

**STRATEGI PENGELOLAAN  
PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK  
STUDI KASUS : POLDA SUMBAR**

**ABSTRAK**

*Berdasarkan Perpres RI No. 16 Tahun 2018, bahwa pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah harus sesuai dengan prinsip pengadaan yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Untuk menerapkan prinsip pengadaan ini, sistem pengadaan barang/jasa yang digunakan adalah dengan menerapkan layanan pengadaan secara elektronik. Salah satu instansi pemerintah yang menerapkan sistem ini adalah pada institusi Kepolisian Republik Indonesia yang salah satunya berada di Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Dalam implementasinya penerapan Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Polda Sumatera Barat belum sepenuhnya berjalan optimal, karena masih ditemukan beberapa kendala dari aspek tata kelola yang mencakup prosedur teknis pengadaan, seperti permasalahan terkait dengan informasi pengadaan, proses pengadaan dan sistem aplikasi pengadaan. Dari kondisi tersebut strategi yang dilakukan untuk peningkatan dan optimalisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Polda Sumatera Barat yaitu dengan membuat perencanaan yang sistematis dan terstruktur dalam memberikan informasi kepada penyedia jasa terkait kegiatan yang dilelangkan dan merencanakan langkah-langkah yang diperlukan sebagai upaya dalam peningkatan kualitas layanan pengadaan. Dari hasil yang direncanakan dilanjutkan dengan melakukan evaluasi dan penetapan dari rencana yang telah dibuat serta mengimplementasikan rencana strategis tersebut dengan tetap berpedoman kepada standar operasional prosedur pengadaan dan peraturan pengadaan barang/jasa, dan dalam proses pelaksanaannya dilakukan pengendalian atau monitoring terhadap prosedur teknis pengadaan, sistem pengadaan dan kualitas dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Polda Sumatera Barat guna mencapai prinsip pengadaan.*

*Kata kunci : LPSE, Pengelolaan, Strategi*

**MANAGEMENT STRATEGY  
ELECTRONIC PROCUREMENT OF GOODS / SERVICES  
CASE STUDY: POLDA SUMBAR**

***ABSTRACT***

*Based on Presidential Decree No. 16 of 2018, that the procurement of goods / services in government agencies must be in accordance with the principles of procurement, namely efficient, effective, transparent, open, competitive, fair and accountable. To apply this procurement principle, the system for procuring goods / services used is by implementing electronic procurement services. One government agency that implements this system is the Indonesian Police, one of which is the West Sumatra Regional Police. In its implementation, the implementation of electronic procurement services at the West Sumatra Regional Police has not fully run optimally, because there are still some obstacles from the governance aspects that include technical procurement procedures, such as problems related to procurement information, the procurement process and the procurement application system. From these conditions the strategy carried out to improve and optimize Electronic Procurement Services at the West Sumatra Regional Police is by making systematic and structured planning in providing information to service providers related to the activities being auctioned off and planning the steps needed as an effort to improve the quality of procurement services. . From the planned results, it is continued by evaluating and determining the plans that have been made and implementing the strategic plan by adhering to the standard operating procedures for procurement and regulations for the procurement of goods / services, and in the implementation process controlling or monitoring the technical procedures for procurement, the procurement system. and the quality of the Electronic Procurement Service at Polda West Sumatra in order to achieve the principles of procurement.*

*Keywords: LPSE, Management, Strategy*